

Gerindra Konsolidasi Kader untuk Prabowo Presiden

SIDOARJO (BN) - Konsolidasi kader calon legislatif (balecek) dan Pengusaha Anak Cabang (PAC) Partai Gerindra Sidoarjo terus dilakukan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat mesin partai dengan memobilisasi seluruh kader dan pengurus. Ketua PAC Gerindra Sidoarjo, Agus Chayusanto, mengatakan bahwa konsolidasi kader sangat penting untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke-10. "Kita harus memastikan bahwa kader kita siap dan solid untuk mendukung Prabowo," ujarnya.



Konsolidasi Bicing And Chayusanto bersama PAC Partai Gerindra Sidoarjo.

GEMPA MOJOKERTO M 4,6 GOYANG RANJANG WARGA SIDOARJO: BUNYINYA SREK-SREK!

Sidoarjo, Pajak Kiri - Gempa berkekuatan M 4,6 berpusat di Mojokerto, Jawa Timur, mengguncang wilayah Sidoarjo pada Rabu (21/6/2023). Warga di sini merasakan gempa dengan durasi sekitar 30 detik. Banyak warga yang terkejut karena bunyinya seperti ledakan atau sirek-srek. "Saya sedang tidur, tiba-tiba ada getaran yang cukup kuat," kata salah satu warga. Gempa ini juga dirasakan di beberapa wilayah lain di Jawa Timur.



TERRAS: Jemaah haji sedang diberangkatkan dari Bandara Juanda.

Cuti Bersama Idul Adha Ditambah Dua Hari

Jelang Wukuf, Jemaah Diimbau Kurangi Aktivitas di Luar Hotel. JAKARTA - Pemerintah merespons usulan penambahan libur Hari Raya Idul Adha. Usulan itu muncul lantaran ada perbedaan dalam penetapan Idul Adha, yakni pada Rabu (28/6) dan Kamis (29/6). Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui sidang isbat menetapkan bahwa 1 Zulhijah 1444 H/2023 jatuh pada 20 Juni 2023. Dengan demikian, Idul Adha (10

Tuntut Kenaikan Siltap, Ribuan Perangkat Desa Demo Gus Muhdlor



Sidoarjo, Bhirawa - Ribuan perangkat desa dari 322 desa di Kabupaten Sidoarjo menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Sidoarjo, Selasa (20/6). Mereka menuntut kenaikan siltap (Sisa Pendapatan Asli Desa) yang akan menaikkan penghasilan tetap (silap) para perangkat desa. "Kami sudah menunggu kenaikan siltap selama bertahun-tahun, tetapi belum ada peningkatan," kata salah satu perwakilan perangkat desa.

Massa perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Sidoarjo menuntut Bupati Ahmad Muhdlor Ali menaikkan siltap.

Masih Ngambang, Bupati Tidak Ada Ditempat 'Tugas Luar'

SIDOARJO - Di ruang media Pendojo Delta Wilura, puluhan perwakilan pengurus PPD Sidoarjo menggelar aksi demonstrasi. Mereka menuntut Bupati Ahmad Muhdlor Ali untuk segera menunjuk wakil bupati. "Kami sudah menunggu wakil bupati selama bertahun-tahun, tetapi belum ada penunjukan," kata salah satu perwakilan pengurus PPD. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap lambatnya proses pemilihan wakil bupati.



PERBAR: Petugas Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo memeriksa hewan kurban dari luar daerah.

Jelang Idul Adha, Pemkab Perketat Lalu Lintas Hewan Kurban dari Luar Daerah

SIDOARJO (BN) - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperketat pemeriksaan hewan kurban yang masuk ke wilayah setempat menjelang Idul Adha. Petugas akan memeriksa kesehatan hewan kurban sebelum diizinkan masuk ke wilayah. "Kami ingin memastikan bahwa hewan kurban yang masuk adalah hewan yang sehat dan halal," kata salah satu petugas. Pemeriksaan ini dilakukan di beberapa titik masuk ke wilayah.

Pemkab Sidoarjo Siapkan 4 Skema Kenaikan Siltap



SIDOARJO - Perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Sidoarjo menggelar aksi di depan Pendopo Delta Wilura kemarin (20/6). Mereka menuntut adanya kenaikan penghasilan tetap (silap) perangkat desa. Bupati Ahmad Muhdlor Ali mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan 4 skema kenaikan siltap. "Kami akan mempertimbangkan semua skema yang diajukan," katanya.

Massa perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Sidoarjo menuntut Bupati Ahmad Muhdlor Ali menaikkan siltap.

Unjuk Rasa, Perangkat Desa Minta Kenaikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Purna Tugas

Sidoarjo, Pajak Kiri - Ribuan perangkat desa dari 322 desa di Kabupaten Sidoarjo menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Sidoarjo, Selasa (20/6). Mereka menuntut kenaikan siltap (Sisa Pendapatan Asli Desa) yang akan menaikkan penghasilan tetap (silap) para perangkat desa. "Kami sudah menunggu kenaikan siltap selama bertahun-tahun, tetapi belum ada peningkatan," kata salah satu perwakilan perangkat desa.



PERBAR: Petugas Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo memeriksa hewan kurban dari luar daerah.

Pasien BPJS Bisa Mendapat Layanan Linac dan Brakiterapi

DI IPK RSUD Sidoarjo - Pasien kanker di RSUD Sidoarjo yang menjadi peserta BPJS Kesehatan kini sudah bisa mendapatkan layanan linac dan brakiterapi. Sebelumnya, layanan ini hanya tersedia untuk pasien yang memiliki asuransi swasta. "Kami ingin memastikan bahwa semua pasien kanker di RSUD Sidoarjo mendapatkan layanan terbaik," kata salah satu dokter. Layanan ini akan membantu meningkatkan kualitas hidup pasien kanker.

Pemkab Sidoarjo Siapkan 4 Skema Kenaikan Siltap

SIDOARJO - Perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Sidoarjo menggelar aksi di depan Pendapa Delta Wibawa kemarin (20/6). Mereka menuntut adanya kenaikan penghasilan tetap (siltap). Berdasar hasil aksi kemarin, Pemkab Sidoarjo menyiapkan empat skema kenaikan siltap.

Pada pukul 09.30, para perangkat desa menggelar aksi di depan pendapa. Tak lama berorasi, perwakilan pengurus PPDI Sidoarjo diajak masuk ke pendapa untuk koordinasi bersama Pj Sekda Sidoarjo Andjar Surjadianto, Asisten I Pemkab Sidoarjo M. Ainur Rahman, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Mulyawan, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlari, dan sejumlah pejabat lainnya. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor tidak bisa hadir karena sedang ada tugas di Jakarta.

Di hadapan pejabat Pemkab Sidoarjo, perangkat desa menyampaikan unek-unek. Intinya, mereka ingin ada kenaikan penghasilan tetap sehingga siltap Kades sebesar Rp 5 juta per bulan, siltap sekretaris desa sebesar Rp 3,5 juta per bulan, dan siltap perangkat desa, Kasi, Kaur, dan Kasun sebesar Rp 3 juta per bulan. Selain itu, mereka ingin tunjangan purnatugas perangkat desa sebesar Rp 50 juta.

Ketua PPDI Sidoarjo Dian Sudariyanto menyatakan, skema tersebut dirasa tepat mengingat tahun ini belum ada kenaikan siltap



MINTA KENAIKAN UPAH: Perangkat desa dari seluruh wilayah Sidoarjo yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Pendapa Delta Wibawa kemarin (20/6).

sama sekali. Saat ini siltap Kades di Sidoarjo sebesar Rp 3.725.000, siltap Sekdes sebesar Rp 2.630.000, dan siltap perangkat desa sebesar Rp 2.265.000. "Yang jelas, siltap harus naik. Untuk nominalnya, kami tunggu koordinasi lebih lanjut dengan Pemkab Sidoarjo," katanya. Asisten I Pemkab Sidoarjo M. Ainur Rahman menyatakan, pihaknya sudah menghitung

besaran kenaikan siltap. "Ada empat skema perhitungannya. Namun, hitungan mana yang nantinya diterapkan masih menunggu keputusan Pak Bupati. Nanti disampaikan lebih lanjut," terang Ainur. Untuk nominalnya, dia menyebut naik dari yang ada saat ini. Berdasar hitungan empat skema tersebut, ada kenaikan siltap.

Ketua Komisi A Dhamroni Chudlari

menyebutkan, PPDI sudah punya hitungan seperti yang jadi tuntutan mereka, sedangkan Pemkab Sidoarjo juga punya perhitungan. "Tinggal itu nanti dipadukan. Namun, hasil akhirnya tetap harus sesuai kemampuan APBD Sidoarjo," katanya. Pihaknya menyebutkan, keputusan besaran siltap harus realistis menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. (uzi/c12/any)

Jawa Pos

Selalu Jaga Kekompakan dan Kesehatan

Sidoarjo, Memorandum

Kepada 900 jemaah calon haji (JCH) Kabupaten Sidoarjo Kloter 75 dan 76, Wakil Bupati H Subandi SH memberikan suntikan semangat dan mengimbau untuk selalu menjaga kekompakan. Ia berpesan untuk saling menjaga satu sama lain. Selain itu yang tidak kalah pentingnya menjaga kesehatan.

Pesan ini diungkapkan wabup saat memberangkatkan mereka di Pendopo Delta Wibawa, Senin (19/6).

Dengan keberangkatan hari ini saya berharap semua JCH sehat mulai dari tanah air ke tanah suci dan tidak ada persoalan yang berarti saat berada di tanah suci dan semua ibadah berjalan lancar," ujar wabup.

Subandi berdoa agar seluruh JCH dapat diberikan Allah badan sehat dan semua kegiatan beribadah yang dilakukan diberikan suatu kemudahan. Dikatakannya dengan kondisi

dan fisik yang prima, JCH dapat menunaikan ibadah hajinya dengan sempurna.

"Mudah-mudahan dengan keinginan haji yang luar biasa ini bisa mencapai haji yang mabrur, tetap diberikan kesehatan dari berangkat sampai kembali ke tanah air," doanya.

Wabup mengatakan ibadah haji merupakan ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima. Untuk itu menjaga kesehatan penting dilakukan. Selain itu dituntut dengan niat yang kuat untuk dapat melaksanakan ibadah haji sampai selesai.

Dengan begitu ia yakin seluruh JCH dapat melakukan semua rukun wajib dan sunah haji secara sempurna yang pada akhirnya menjadi haji yang mabrur.

"Saya titip doa kepada pangeran semua agar program visi dan misi bupati dan wakil bupati bisa berjalan dengan maksimal, pembangunan berjalan dengan baik dan lancar dan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo semakin meningkat," titipnya.

Sementara itu Kakan Kemenag Kabupaten Sidoarjo Dr H Arwani Muslick, MAG, MHI merinci jumlah JCH yang diberangkatkan di pendopo hari ini sebanyak 445 orang pada kloter 75 ditambah petugas haji 5 orang. Sedang kloter 76 juga sebanyak 445 orang sehingga total ada 900 JCH.



Wabup Sidoarjo H Subandi memberangkatkan ratusan JCH di Pendopo Delta Wibawa serta berharap keberangkatan tamu Allah itu berjalan lancar.

"Tadi pagi juga telah diberangkatkan dari Aula Kemenag Sidoarjo yaitu kloter 74 sebanyak 65 jemaah yang bergabung dengan JCH Kabupaten Situbondo dan seluruh jemaah akan diterbangkan ke Mekah besok pada pukul 15.00 untuk kloter 75, sedangkan untuk kloter 76 pukul 16.00 jika sesuai dengan jadwal," ungkapnya.

Pada kesempatan ini wabup menyempatkan diri meng-hampiri JCH yang terlihat terharu akan keberangkatannya ke tanah suci. Ia memberikan semangat dan support karena berkesempatan menjadi tamu Allah setelah menunggu keberangkatan yang cukup lama selama 12 tahun. Sekadar diketahui untuk saat ini baru pendaftaran haji saat ini baru akan berangkat 33 tahun lagi. (kri/jok/nov)

MEMORANDUM
BERKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Gerindra Konsolidasi Kader untuk Prabowo Presiden

SIDOARJO (BM) – Konsolidasi bakal calon legislatif (bacaleg) dan Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Gerindra Sidoarjo terus dilakukan. Kegiatan ini untuk menghangatkan mesin partai dengan 'membakar' semangat kemenangan.

Konsolidasi secara door to door atau dari pintu ke pintu itu dilakukan bersama Bacaleg Dapil Sidoarjo I (Sedati, Buduran dan Sidoarjo), Andri Chrystanto dan PAC Partai Gerindra Sedati, Minggu (18/6). Mereka didampingi pengurus DPC Gerindra Sidoarjo.

Sekretaris DPC Partai Gerindra, Sidoarjo M. Sujayadi, menuturkan bahwa seluruh kader Partai Gerindra wajib untuk memperkuat organisasi. Selain itu, para kader harus terus mengawal program-program dari DPP, DPD dan juga DPC.

"Partai Gerindra harus terus melak-

sanakan konsolidasi organisasi agar dapat memperkuat kepengurusan dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan sampai tingkat RT," ucap Sujayadi.

Lanjut Sujayadi, untuk meraih kemenangan, seluruh kader harus merapatkan barisan, membudayakan gotong royong dan tentunya harus satu komando satu barisan. "Itu harus dilakukan semua kader untuk mewujudkan Gerindra menang dan Prabowo Presiden," paparnya.

Andri Chrystanto menyampaikan bahwa PAC dan anak ranting memiliki peran penting sebagai ujung tombak, dalam menyampaikan visi misi Partai Gerindra. Tujuannya agar mampu menarik simpati konstituen dan masyarakat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Mahkamah konstitusi (MK) dengan adanya putusan MK mengenai pemilu

proporsional terbuka. Kebijakan ini dinilai membuat Partai Gerindra bisa berkonsentrasi penuh memenangkan pemilu.

"Saya menegaskan jika sistem terbuka maupun tertutup, saya akan membesarkan Gerindra di Kabupaten Sidoarjo," tegas Andri.

Andri yang juga Sekretaris PAC Gerindra Kecamatan Sidoarjo itu mengatakan selalu memperkuat soliditas anggota. PAC Gerindra Sedati diajak all out dalam menggelorakan dan mewujudkan kemenangan Partai Gerindra, Prabowo Presiden, dan Bambang Haryo Soekartono (BHS) kembali duduk di gedung DPR RI.

"Semoga dalam kegiatan kita hari ini dapat memupuk semangat para kader untuk terus memperkuat struktur organisasi dalam menjemput kemenangan Partai Gerindra di Sidoarjo," terang Andri. (udi)



KONSOLIDASI: Bacaleg Andi Chrystanto bersama PAC Partai Gerindra Sedati.

BMIST

Cuti Bersama Idul Adha Ditambah Dua Hari

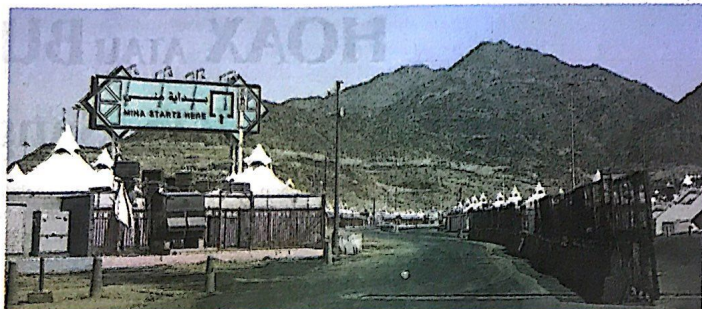
Jelang Wukuf, Jemaah
Diimbau Kurangi
Aktivitas di Luar Hotel

JAKARTA - Pemerintah me-
respons usulan penambahan
libur Hari Raya Idul Adha.
Usulan itu muncul lantaran

ada perbedaan dalam pene-
tapan Idul Adha, yakni pada
Rabu (28/6) dan Kamis (29/6).
Sebagaimana diketahui,
pemerintah melalui sidang
isbat menetapkan bahwa 1
Zulhijah 1444 H/2023 jatuh
pada 20 Juni 2023. Dengan
demikian, Idul Adha (10

Zulhijah) bertepatan dengan
Kamis (29/6). Sementara
itu, berdasar hasil hisab
hakiki wujudul hilal, Mu-
hammadiyah sebelumnya
mengumumkan bahwa 1 Zul-
hijah 1444 H bertepatan de-
ngan 19 Juni 2023. ■

► Baca Cuti... Hal 11



MEDIA CENTER HAJI 2023

DI MINA: Tenda-tenda yang akan digunakan jemaah haji selama prosesi melontar jumrah.

Jawa Pos

Cuti Bersama Idul Adha Ditambah Dua Hari

Sambungan dari hal 1

Sehingga Idul Adha jatuh
pada Rabu (28/6). Pemerintah
pun melalui surat keputusan
bersama (SKB) tiga menteri
memutuskan jumlah cuti
bersama tahun ini ditambah.
Di dalam surat yang diteken
Menteri Agama Yaqut Cholil
Qoumas, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan
Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Re-
formasi Birokrasi (PAN-RB)
Abdullah Azwar Anas itu,
diputuskan 28 dan 30 Juni
sebagai cuti bersama. De-
ngan demikian, ASN atau
pekerja pada umumnya bisa
menjalankan salat Idul Adha
pada 28 Juni.

Anas menjelaskan, pene-
tapan libur tersebut tidak
semata-mata karena ada dua
versi Idul Adha. "Pemerintah
ingin memberikan *quality
time* kepada keluarga ASN
atau pekerja," katanya di kan-
tor wakil presiden kemarin.

Dia menambahkan, saat
ini sedang masa libur anak
sekolah. Karena itu, penam-
bahan cuti bersama dalam
rangka Idul Adha tersebut
bisa dijadikan momen liburan

keluarga. Dengan adanya
cuti bersama itu, pekan depan
bakal ada *long weekend*. Yaitu,
mulai Rabu (28/6) sampai
dengan Minggu (2/7).

Mantan bupati Banyuwangi
itu juga mengatakan, sesuai
arahan Presiden Joko Wi-
dodo, diharapkan ada per-
gerakan ekonomi di daerah-
daerah. Khususnya di wila-
yah tempat rekreasi.

Sementara itu, pemerintah
Arab Saudi memutuskan
Idul Adha tahun ini jatuh
pada 28 Juni. Artinya,
jemaah haji bakal melakoni
ibadah puncak, yakni wukuf
di padang Arafah, pada 27
Juni. Dengan waktu yang
tinggal sepekan, para je-
maah, khususnya yang lan-
sia dan berisiko tinggi, di-
minta lebih banyak berada
di hotel serta mengurangi
aktivitas ibadah sunah di
luar pemondokan.

Kepala Pusat Kesehatan
Haji Kementerian Kesehatan
Liliek Marhaendro Susilo
mengatakan, petugas kese-
hatan terus melakukan skri-
ning kondisi jemaah. Rata-
rata ada 50 jemaah di setiap
kloter yang kategori risiko
tinggi dan masuk kelompok

untuk safari wukuf.

Safari wukuf adalah la-
yanan khusus untuk jemaah
haji yang sakit saat pelak-
sanaan wukuf di padang
Arafah. Mereka tidak me-
laksanakan wukuf bersama
rombongan kloternya di
tenda-tenda. Tetapi, wukuf
dilakukan dari mobil yang
diparkir di area Arafah.

Liliek mengatakan, saat
ini suhu di Makkah cukup
tinggi. Jemaah berisiko tinggi
diharapkan tidak sering
terpapar sinar matahari.
"Cukup beraktivitas di peng-
inapan saja. Ibadah juga di
hotel," kata Liliek di Klinik
Kesehatan Haji Indonesia
(KKHI) Makkah kemarin.

Dia menjelaskan, di Arafah
ada tenda untuk pos ke-
sehatan. Di dalamnya ter-
sedia ruang perawatan
sampai 20 ranjang. Fasilitas
itu bisa digunakan untuk
perawatan jemaah yang
terkena serangan *heatstroke*.

Selain itu, ada tenda pos ke-
sehatan satelit yang berjum-
lah lima titik. Namun, fasili-
tasnya tidak terlalu lengkap karena
sifatnya hanya untuk peme-
riksaan kesehatan sementara.
(* / wan / c6 / c17 / fal)

Jawa Pos

Unjuk Rasa, Perangkat Desa Minta Kenaikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Purna Tugas



ORASI: Para perangkat desa berunjuk rasa di depan Pendapa Delta Wibawa, Senin (20/6) pagl.

KOTA-Ratusan perangkat desa berunjuk rasa di depan Pendapa Delta Wibawa, Senin (20/6). Mereka meminta Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat desa melalui penghasilan tetap (Siltap) dan tunjangan purna tugas.

Para perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI) Sidoarjo sempat berorasi di depan pendapa. Mereka juga membentangkan sejumlah tulisan yang berisikan uneg-uneg para perangkat desa di Kota Delta.

Ketua PPDI Sidoarjo Dian Sudariyanto mengatakan, perangkat desa melakukan unjuk rasa untuk menuntut kesejahteraan yang dijanjikan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor kepada perangkat desa melalui kenaikan gaji setiap bulan.

Selain itu mereka juga menuntut untuk menaikkan besaran tali asih yang diberikan kepada mantan kepala desa yang sudah habis masa tugasnya. "Beliau (bupati, red) telah menjanjikan pada tahun 2022 kita diundang di pendapa, akan menaikkan siltap perangkat desa setiap tahun, buktinya di tahun 2023 tidak

ada sama sekali," ujar Dian.

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Sidoarjo No 77 Tahun 2018 dituangkan penghasilan tetap Kepala Desa (Kades) sebesar sebesar Rp 3.650.000, Sekretaris Desa (Sekdes) Rp 2.555.000 dan Perangkat Desa Rp 2.190.000 perbulan.

Mereka yang mengenakan seragam dinas menuntut kenaikan siltap Rp 5 juta untuk kades dan Rp 3,5 juta untuk sekdes serta perangkat desa sebesar Rp 3 juta. Sedangkan tunjangan purna tugas perangkat desa mencapai sebesar Rp 50 juta.

● Ke Halaman 10



Unjuk Rasa, Perangkat Desa...

"Selama ini purna tugas yang diterima hanya Rp 10 juta, tidak cukup untuk kebutuhan, disbanding dengan pengabdian selama puluhan tahun.

Untuk tunjangan purna tugas kami menuntut Rp 50 juta perdesa. Kita menuntut ini, seiring dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat," ucapnya.

Fajar Mardianto perangkat desa asal Tangulangun menambahkan,

perangkat desa merupakan arus bawah yang perannya sangat penting di pemerintahan. Pihaknya ingin ada realisasi dari janji yang disampaikan Bupati Sidoarjo.

"Setidaknya ada kenaikan seperti yang sudah dijanjikan," terang Fajar.

Dalam unjuk rasa tersebut, perwakilan perangkat desa ditemui oleh Pj Sekda Andjar Surjadianto, Asisten I M Ainur Rahman, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudluri dan Wakil Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Haris.





Perangkat desa seluruh Sidoarjo demo menuntut kenaikan Siltap, Selasa (20/6).

Perangkat Desa Se-Sidoarjo Tuntut Kenaikan Siltap

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Ratusan perangkat desa tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Sidoarjo menggelar demonstrasi di Pendapa Delta Wibawa, Selasa (20/6). Mereka menuntut pemkab menaikkan besaran penghasilan tetap (siltap) dan pemberian tunjangan purna tugas bagi perangkat dan kepala desa (kades).

Saat ini, berdasarkan Perbup Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018, siltap kades Rp 3.650.000, sekretaris desa (sekdes) Rp 2.555.000., dan perangkat desa Rp 2.190.000 per bulan. Nah, dalam aksi demo ini, para perangkat desa tersebut meminta agar siltap dinaikkan.

Untuk kades naik menjadi Rp 5 juta, sekdes menjadi Rp 3,5 juta, dan perangkat desa menjadi Rp 3

juta. Sedangkan untuk tunjangan purna tugas perangkat desa, minta senilai Rp 50 juta.

"Dua tahun lalu kami diundang bupati ke sini (Pendapa Delta Wibawa) dan dijanjikan peningkatan kesejahteraan. Tetapi sampai sekarang belum ada realisasinya," kata Ketua PPDI Sidoarjo Dian Sudariyanto.

Ia menambahkan, PAD Sidoarjo selama ini terus meningkat. Karena itu, tidak ada alasan untuk tidak menaikkan siltap perangkat desa di Kota Delta. "Kenyataannya sampai sekarang tuntutan kami soal kenaikan siltap tak kunjung direalisasikan," tegasnya.

Demo para perangkat desa ini ditemui Pj Sekda Sidoarjo Andjar Surjadianto dan Asisten I Ainur Rahman. Ada juga pimpinan dan anggo-

ta Komisi A DPRD Sidoarjo. Ainur mengatakan, pihaknya menampung aspirasi ini dan akan membahasnya dengan Bupati Ahmad Muhdlor.

Ainur menambahkan, Bupati Ahmad Muhdlor tidak bisa menemui para perangkat desa, karena pada waktu bersamaan sedang ada tugas di Jakarta. "Nanti kalau beliau (bupati) sudah di Sidoarjo akan dibahas kembali soal tuntutan ini," tandasnya.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo M Dhamroni Chudlori menyatakan, bakal mengawal aspirasi dan tuntutan perangkat desa Sidoarjo. "Kami berkomitmen mengawal aspirasi ini untuk kesejahteraan bersama. Soal nominal kenaikannya, menyesuaikan kekuatan APBD Sidoarjo," tandasnya. (sta/rd)

Tuntut Kenaikan Siltap, Ribuan Perangkat Desa Demo Gus Muhdlor



alikusyanto/bhirawa

Massa perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Sidoarjo menuntut Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menaikkan siltap.

Sidoarjo, Bhirawa

Ribuan perangkat desa dari 322 desa di Kabupaten Sidoarjo menggelar aksi demonstrasi di kantor bupati, Selasa (20/6). Mereka menuntut Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) menetapi janji kampanyenya, yang akan menaikkan penghasilan tetap (siltap) para perangkat desa.

Perangkat desa ini datang ke Kantor Bupati Sidoarjo sejak pukul 09.00 WIB. Total ada sekitar 3.220 orang perangkat desa, mulai Sekdes hingga jabatan perangkat desa lainnya. Mereka membawa bendera dan banner serta poster yang berisi tuntutan kenaikan siltap.

Membawa dua mobil komando, para koordinator PPD (Persatuan Perangkat Desa)

► ke halaman 11



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Tuntut Kenaikan Siltap, Ribuan Perangkat Desa Demo Gus Muhdlor

● Sambungan hal 1

Indonesia) yang ada di 18 kecamatan yang ada, melakukan orasinya. Tuntutan mereka yang utama adalah, minta kenaikan penghasilan tetap, dan yang kedua menaikkan tunjangan purna tugas bagi perangkat desa yang pensiun.

Siltap untuk perangkat desa yang saat ini sebesar Rp2.150.000/bulan, minta dinaikkan menjadi Rp3.000.000. Siltap untuk Sekdes yang saat ini sebesar Rp3.000.000, minta agar dinaikkan menjadi Rp3.500.000. Kemudian santunan purna tugas bagi perangkat desa, yang saat ini sebesar Rp10.000.000 minta menjadi Rp50.000.000.

Koordinator PPDI Kabupaten Sidoarjo, Diyan Sudaryanto, mengatakan tuntutan itu disampaikan karena selama ini perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo masih belum hidup sejahtera. "Janji Bupati untuk menaikkan Siltap saat kampanye Bupati tahun 2021 lalu, tidak ada bukti," katanya dari atas mobil komando, dihadapan massa perangkat desa Sidoarjo.

Menurut perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo, kalau sampai Bupati tidak menaikkan Siltap yang pernah dijanjikan, maka nanti akan mereka ditagih di akhirat.

Para perangkat desa mengklaim, Kabupaten Sidoarjo yang pernah mendapatkan penghargaan dalam pelayanan publik prima, itu tidak lepas atas peranan juga dari pelayanan yang dilakukan oleh para perangkat desa.

Mereka menganggap Bupati Sidoarjo saat ini telah melanggar UUD 1945. Karena dalam pasal 27 ayat 2 disebutkan, warga negara Indonesia berhak pekerjaan dan penghidupan yang layak. Namun nyatanya menurut mereka, perangkat desa di Sidoarjo hingga saat ini masib belum bisa hidup sejahtera.

Perangkat desa menganggap mereka diremehkan. Karena kedatangan mereka bersama massa itu, tidak ditemui oleh Bupati. Padahal surat permohonan audiensi sudah dilayangkan jauh hari. Pengurus PPD I Sidoarjo tidak bisa ditemui Bupati Ahmad Muhdlor Ali yang sedang ada kegiatan di Jakarta.

Dalam audiensi terkait tuntutan kenaikan Siltap itu, 20 orang perwakilan pengurus PPD I Sidoarjo, ditemui oleh Pj Sekda Anjar Soerjadiyanto dan Asisten Kesra Tata Pemerintahan, M.Ainur Rahman. Serta dua anggota Badan Anggaran dari DPRD Sidoarjo.

Dhamroni Chudori, dari tim Banggar DPRD Sidoarjo kepada massa menyampaikan akan membahas Siltap usulan versi PPD I Sidoarjo dan versi Pemkab Sidoarjo. Menurut dirinya tidak bisa memutuskan dari 1 pihak saja. Sebab resikonya APBD Kabupaten Sidoarjo akan bisa jebol. Koordinator PPD I Sidoarjo, Dian Sudaryanto, sempat berkoar akan terus memperjuangkan kenaikan Siltap bagi perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo tersebut sampai tuntas. [kus.iib]

Masih Ngambang, Bupati Tidak Ada Ditempat “Tugas Luar”

SIDOARJO - Di ruang mediasi Pendopo Delta Wibawa, puluhan perwakilan dan pengurus PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) Kabupaten Sidoarjo ditemui Asisten 1 Ainur Rahman, Kepala Dinas PMD Mulyawan, Pj. Sekda Andjar Surjadi-anto guna mencari solusi atas aksi demonstrasi (demo) di depan Pendopo Selasa (20/6/23) yang melibatkan ratusan massa dari perangkat desa Se Kabupaten Sidoarjo.

“Permohonan maaf dari pak Bupati tidak bisa hadir disini menemui jenengan, dari kemarin on scadule harus kegiatan ke luar kota dipanggil pemerintah pusat dan itu tidak bisa diwakilkan ucap Pj. Sekda.

Prinsipnya semua akan kita komunikasikan bersama sama, intinya kenaikan Siltap dan lain sebagainya salah satunya purna tugas kita sudah hitungan dan alternatif kita bicarakan bersama- sama,” kata Pj. Sekda Andjar.

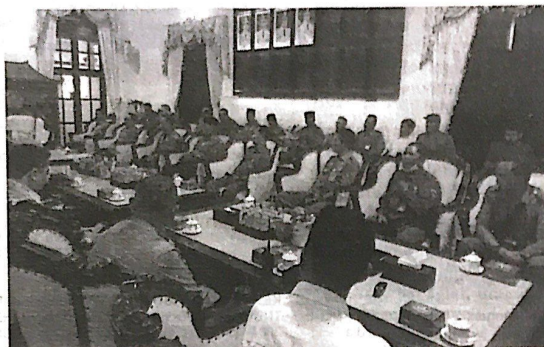
Dian Sudariyanto ketua PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indo-

nesia)Kabupaten Sidoarjo mengatakan “Sudah berbagai cara kita tempuh untuk nego, yang mana kita sudah bersurat berkali- kali tapi selama ini beliau(Bupati) tidak ada respon dan tanggapan. Kita tidak banyak maksud dan tujuan kami, hanya menagih janji beliau saat audensi,” ujar Dian

Kita sudah 2022, tapi faktanya di 2023 tidak ada sama sekali ini yg membuat teman teman apa yg menjadi hak mereka.. kita sudah diberi tugas dgn aplikasi yg begitu berat.. kenapa pemerintah kabupaten tidak memperhatikan kita.

“Termasuk purna tugas yang selama ini kita terima Rp.10 juta untuk modal usaha saja tidak sampai. Bayangkan cukup kah nilai segitu? apa ya cukup, makanya saya munculkan dua permohonan kenaikan Siltap dan masa purna tugas,” ungkap Dian.

Senada Sekdes Desa Banjarbendo Drs. Kusnadi menambahkan, pertama bahwa kami sangat kecewa



Mediasi di ruang tamu Pemkab Sidoarjo ketua PPDI dan pengurus, Asisten 1, Pj. Sekda dan puluhan perwakilan Perangkat Selasa (20/6/23).

bapak bupati tidak ada disini.

“Bupati yang kami banggakan, kami sangat banggakan, tapi kami sangat kecewa pagi hari ini tidak bisa menemui kami. Kedua apa

yang menjadi keinginan kami ini hanya menagih janji,” ungkap Sekdes Banjarbendo.

“Ideal adalah Rp 50 juta. Kita hari ini non teknis, sehingga kami nanti

kembali ke desa masing masing kami Lego pak,” pungkas Kusnadi

Asisten 1 Ainur Rahman juga menanggapi “Jangan hanya gara-gara Siltap kita jadi terpecah seolah-olah ada batas antara pemkab dan pemdes. Jangan mendapatkan yang sedikit tapi menghilangkan yang besar,” ujar Ainur Rahman.

Harapan apa yang sudah kita lakukan untuk Sidoarjo, apalagi ini bisa mengurangi kinerja dan kepercayaan masyarakat. Karena yang punya peradaban dan kita semua adalah keluarga, tapi saya berjanji akan menyampaikan kepada beliau walaupun tidak dalam waktu yang bisa saya janjikan,” pungkas Asisten 1 Ainur Rahman.

Damroni Chudluri ketua komisi A DPRD Sidoarjo usai mediasi di ruangan dihadapan ratusan perangkat desa yang tergabung dalam PPDI Sidoarjo, menyampaikan teman-teman jenengan sudah ada konsep dan itung- itungan PPDI dan sudah disampaikan ke kami. • loe

DUTA

GEMPA MOJOKERTO M 4,6 GOYANG RANJANG WARGA SIDOARJO: BUNYINYA SREK-SREK!

Sidoarjo, Pojok Kiri

Gempa Darat berkekuatan M 4,6 berpusat di Mojokerto juga dirasakan warga Sidoarjo. Gempa Mojokerto ini membuat tempat tidur salah satu warga bergerak sebanyak 3 kali sekitar pukul 20.44 WIB.

“Suaranya srek srek 3 kali pas rebahan di tempat tidur, pas saya lihat jam, kejadian-nya pukul 20.44 WIB,” kata salah satu warga, Yunita (44) warga Sepanjang kepada pojokdelta, Senin (19/6/2023).

Wanita dua anak ini mengaku getaran pertama dirasakan lebih keras. Setelah itu getaran kedua dan ketiga melemah.

“Guncangan pertama lebih keras. Setelah itu kedua dan ketiga melemah. Terus kepala agak pusing,” tambahnya.

Saat merasakan getaran gempa, jelas dia, dirinya sempat berteriak gempa-gempa.”Saya tadi sempat berteriak gempa. Tapi anak-anak saya nggak ngeh. Saudara-saudara yang lain juga terasa,” tambahnya.

Meski sebagian merasakan getaran gempa, warga tetap tenang dan tidak pan-



ik. “Tidak ada yang lari. Rata-rata di dalam rumah semua tadi,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan Sriatun (38). Dia merasakan gempa saat bercanda dengan kucing peliharaannya.”Iya, terasa banget pas duduk.

Terus kok pusing. Saya pikir kepala ku kurang darah, mbliyur. Tibake (Ternyata) gempa,” tambahnya.

Sebelumnya Gempa berkekuatan Magnitudo 4,6 mengguncang Mojokerto sekitar pukul 20.44 WIB. Gempa

yang terjadi adalah gempa darat.”Pusat gempa berada di darat 10 km Timur Laut Kab. Mojokerto,” cuit @infoB-MKG, Senin (19/6/2023).

Gempa M 4,6 ini berpusat pada koordinat 7.49 LS, 112.54 BT yang ber-

pusat di darat dengan jarak 10 km Timur Laut Kab Mojokerto. Ada pun kedalaman gempa yakni 9 Km dengan perkiraan dirasakan dengan getaran mencapai IV MMI di wilayah Mojokerto dan Pasuruan. (eddy)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dapati 2.410 Pemilih Beralamat di RT 0, RW 0

KPU Pastikan Mereka Punya Hak Pilih

SIDOARJO - Hingga kemarin, tercatat 1.468.302 orang yang masuk dalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) Pemilu 2024 di Sidoarjo. Dari jumlah itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo menemukan 2.410 pemilih yang alamatnya tidak jelas.

Ketua Bawaslu Sidoarjo Haidar Mundjid mengatakan bahwa mereka beralamat di RT 0, RW 0. "Totalnya ada 2.410 orang yang di KTP mereka tertulis RT 0 dan RW 0," ungkapnya. Mereka tersebar di sejumlah kecamatan. Di antaranya, di Kecamatan Tanggulangin ada 176 orang, di Desa Gedang Porong ada 1.180 orang, dan di Prambon ada 33 orang.

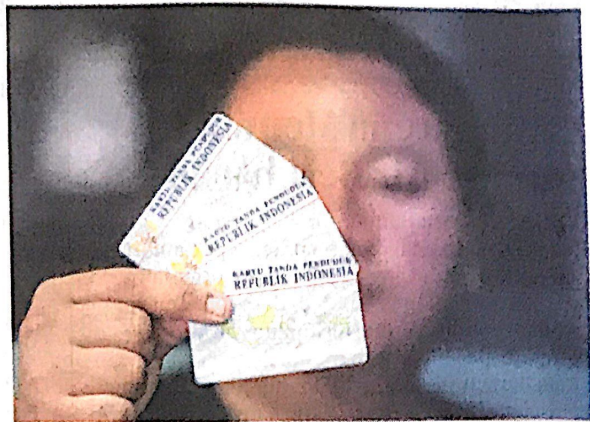
Haidar menyebut, alamat mereka tertulis RT 0 dan RW 0 karena sejumlah penyebab. Antara lain, mereka beralamat di tanah kavlingan, perumahan baru yang belum ada RT dan RW-nya, hingga warga yang terdampak relokasi lumpur panas Lapind Solusinya, pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU Sidoarjo dan pihak terkait agar ada perbaikan RT dan RW tersebut. "Kami akan memberikan saran perbaikan kepada KPU dan berkoordinasi dengan pihak terkait," terangnya.

Termasuk terkait temuan lainnya. Sebab, selain adanya warga yang ber-RT 0 dan RW 0, ada 123 warga yang ternyata sudah meninggal dunia dan pindah ke luar kota. Namun, mereka masih masuk dalam daftar pemilih. Perinciannya, di Kecamatan Tulangan ada

22 orang dan di Waru ada 101 pemilih. Selain itu, ada 4 warga yang seharusnya bisa masuk dalam daftar pemilih karena memenuhi syarat tetapi belum terdaftar.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo Reddy Kusuma menyatakan, adanya RT 0 dan RW 0 harus disikapi oleh pemerintah desa setempat untuk membentuk RT dan RW baru. "Harus ada SK kepala desa atau kepala kelurahan tentang pembentukan RT-RW. Kami siap memfasilitasi perubahannya," katanya. Pihaknya tidak bisa langsung menetapkan penambahan RT dan RW baru.

Ketua KPU Sidoarjo M. Iskak mengatakan, terkait warga yang RT dan RW-nya disebut 0, pihaknya memastikan warga tersebut tetap bisa memilih. (uzi/c17/any)



DIMAS MAULANA/JAWA POS

TETAP MEMILIH: Warga yang beralamat RT 0, RW 0 bisa menggunakan haknya dalam pemilu tahun depan.

Jawa Pos

Pasien BPJS Bisa Mendapat Layanan Linac dan Brakiterapi

Di IPKT RSUD Sidoarjo

SIDOARJO - Pasien kanker di Sidoarjo yang menjadi peserta BPJS Kesehatan saat ini sudah bisa mengakses pelayanan radioterapi di Instalasi Pelayanan Kanker Terpadu (IPKT) RSUD Sidoarjo.

Saat dikonfirmasi kemarin (20/6), Direktur RSUD Sidoarjo dr Atok Irawan mengatakan bahwa sudah terjalin perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dan pihaknya untuk penjaminan biaya pelayanan radioterapi.

"Alhamdulillah, kerja sama Jumat (16/6) lalu sudah kami lakukan," ujarnya.

Atok mengungkapkan bahwa

terhitung Senin (19/6) radioterapi di IPKT, baik *linac*, brakiterapi, maupun CT scan, sudah bisa melayani pasien kanker peserta BPJS Kesehatan.

Sebelumnya, diketahui ada sekitar 48 pasien kanker yang merupakan peserta BPJS Kesehatan belum bisa ditangani karena belum ada kerja sama. Mereka membutuhkan layanan *linac* dan brakiterapi.

"Tapi, masih akan ada pendataan ulang mengenai jumlah pasien kanker BPJS," ungkapnya. Kendati sudah bisa melayani pasien kanker BPJS Kesehatan, dalam dua hari kemarin belum ada pasien yang ditangani.

Kabid Pelayanan RSUD Sidoarjo

dr Prima Dessy Kusuma mengatakan, belum ada penanganan pasien karena masih menunggu tambahan data dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

"Fokus kami setelah kerja sama ini adalah sosialisasi terlebih dahulu ke FKTP mengenai kriteria dan syarat untuk pasien kanker bisa dirujuk ke radioterapi," jelasnya. Menurut Prima, dalam minggu ini akan ada sosialisasi mengenai hal tersebut.

Dengan adanya kerja sama itu, lanjut Prima, nanti pasien BPJS Kesehatan yang mendapat pelayanan radioterapi tidak dipungut biaya sepeser pun. "Rawat jalan gratis. Tapi,

jika rawat inap dan ada kenaikan tingkat kamar, pasien akan dikenai biaya sesuai ketentuan," katanya.

Radioterapi nanti memiliki batasan dalam penanganan pasien. Prima mengungkapkan bahwa *linac* nanti bisa melayani sekitar 12 pasien per hari. Sedangkan brakiterapi hanya bisa melayani dua pasien per hari.

Sementara itu, Kabag SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo Dody Widodo berharap adanya kerja sama dalam radioterapi akan membantu percepatan penanganan pasien kanker di Sidoarjo. "Jadi, masyarakat bisa segera dilayani," tuturnya. (eza/c7/any)

Jawa Pos



TERHARU: Jemaah haji saat akan diberangkatkan dari Pendapa Delta Wibawa.

Dapat Tambahan Kuota Haji 88 Jemaah

KOTA-Kloter haji terakhir dari Sidoarjo sudah diberangkatkan. Namun Kepala Kantor Kementerian Agama Sidoarjo Arwani mengumumkan bahwa ada tambahan kuota jemaah haji asal Sidoarjo. Kuota tambahan itu diisi oleh calon jemaah haji cadangan yang telah melakukan pelunasan dan berada di nomor urut berikutnya.

Jumlahnya sebanyak 88 orang. Jemaah haji tersebut telah melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BP-IH) pada Senin (19/6). Sama seperti jemaah haji lainnya, mereka juga mendapatkan materi dari kegiatan manasik haji sebelum berangkat ke Tanah Suci.

Meski begitu, informasi terkait jadwal keberangkatan mereka masih belum diketahui. Mereka masih menunggu konfirmasi resmi dari Kantor Wilayah Kement-

rian Agama (Kanwil Kemenag) Jawa Timur.

Arwani menyampaikan perkiraan tanggal keberangkatan jemaah haji tambahan dari Sidoarjo kemungkinan akan dilaksanakan pada 23 Juni mendatang. Namun, hal ini masih harus dikonfirmasi oleh Kanwil Kemenag Jawa Timur untuk memastikan kebenarannya.

"Untuk pastinya, masih menunggu informasi resmi dari Kanwil Kemenag Jawa Timur," katanya.

Arwanijuga menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Jawa Timur untuk memperoleh informasi terkini secepat mungkin. Seiring dengan penambahan kuota jemaah haji asal Sidoarjo, dia mengingatkan para calon jemaah haji untuk mempersiapkan diri dengan baik. (nis/vga)



Hari Terakhir Pendaftaran PPDB Jalur Zonasi

KOTA-Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi berakhir hari ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo secara resmi membuka pendaftaran jalur zonasi sejak 19 Juni lalu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Tirta Adi, mengungkapkan bahwa kuota penerimaan siswa melalui jalur zonasi pada tahun ini mencapai 6.501 siswa. Jumlah tersebut bakal menjadi 410 rombongan belajar (rombel). "Pagu kuota zonasi yang tersedia pada PPDB tingkat SMP tahun ini sebanyak 6.501 siswa, tersebar di 46 SMP negeri," katanya.

Dia menjelaskan, masing-masing calon siswa bisa memilih hingga dua SMP

negeri yang mereka inginkan. Selain itu, mereka juga diberi kesempatan untuk mengubah pilihan sekolah satu kali. Namun perubahan tersebut harus dilakukan paling lambat 12 jam sebelum penutupan pendaftaran PPDB.

Untuk memastikan data yang terkumpul akurat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo akan melakukan verifikasi dan validasi data di lapangan. Proses ini akan dilakukan pada 20 hingga 26 Juni 2023. Salah satunya memvalidasi jarak antar rumah ke sekolah. "Ini merupakan langkah penting dalam penyelenggaraan PPDB jalur zonasi," imbuhnya.

Hasil penetapan calon peserta didik baru akan di-

umumkan pada 27 Juni pukul 14.00. Pengumuman tersebut akan mencakup informasi mengenai sekolah yang diterima oleh para calon siswa. Sekaligus memberikan kepastian kepada mereka untuk melanjutkan pendidikan di SMP negeri yang telah ditentukan.

Dengan dimulainya pendaftaran PPDB tingkat SMP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo berharap agar proses ini dapat berjalan dengan lancar dan adil bagi semua calon peserta didik baru. Mereka juga mengimbau orang tua atau wali siswa untuk memanfaatkan waktu yang tersedia dengan baik guna memilih sekolah yang sesuai. (nis/vga)



PILIHAN: SMPN 2 Waru menjadi salah satu sekolah pilihan dalam PPDB jalur zonasi.





BMIST

DIPERIKSA: Petugas Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo memeriksa hewan korban dari luar daerah.

Jelang Idul Adha, Pemkab Perketat Lalu Lintas Hewan Kurban dari Luar Daerah

SIDOARJO (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperketat arus lalu lintas hewan kurban yang akan masuk ke wilayah setempat sebagai upaya pencegahan penularan Lumpy Skin Disease atau virus (LSD) menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha.

Kepala Bidang Produksi Peternakan dan Kesehatan, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo Tony Hartono di Sidoarjo, Jumat mengatakan, mengacu pada peraturan nasional, sebagai salah satu upaya pencegahan virus LSD melalui lalu lintas hewan kurban.

"Pedagang atau takmir yang hendak memasukkan hewan kurban ke Sidoarjo, mereka harus melakukan permohonan ke dinas terkait," ucap Tony.

Selanjutnya, lanjut Tony, dari dinas akan mengeluarkan rekomendasi pemasukan, kemudian dasar dari rekomendasi tersebut nantinya mengacu pada surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan dari daerah asal atau sertifikat veterinary.

"Sedangkan jika hewan kurban masuk ke Sidoarjo syaratnya harus sudah divaksin dan hewan dinyatakan sehat selama 14 hari terakhir," tuturnya.

Hingga saat ini, sebanyak 250 ekor hewan ternak di Sidoarjo terindikasi virus LSD dan 35 ekor hewan ternak terindikasi virus PMK. Semuanya merupakan milik peternak. "Alhamdulillah kondisinya berangsur membaik beberapa hari terakhir," katanya.

Pihaknya optimistis, angka penularan tersebut akan terus menurun jika pengetatan lalu lintas hewan kurban tersebut dilakukan terus menerus.

"Kami sudah melakukan pengendalian dan pencegahan. Ternak dari luar daerah yang masuk Sidoarjo wajib dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal, dan minimal sudah divaksin PMK," katanya.

Dikatakan Tony, pihaknya juga mengedukasi para peternak dan membagikan desinfektan untuk disemprotkan ke kandang secara rutin.

"Penularan LSD sendiri selain melalui kontak langsung juga melalui vektor lalat. Maka dari itu kita bagikan desinfektan untuk membunuh lalat," tuturnya. (udi)



ISTIMEWA

TAK DIKETAHUI ASALNYA: Belasan butir peluru yang ditemukan warga di tanah kosong di Desa Tempel, Krian, Minggu (18/6) sore.

Warga Krian Temukan 16 Peluru yang Masih Aktif

SIDOARJO – Belasan butir peluru tajam aktif ditemukan warga Desa Tempel, Krian, di sebuah tanah kavling dekat permukiman. Warga mengetahui adanya peluru tersebut setelah mendengar suara ledakan. Saat didatangi, di sekitar sumber suara itu terdapat 16 butir peluru yang tersebar di berbagai titik.

Ketika dikonfirmasi kemarin (20/6),

■ Kanitreskrim Polsek Krian AKP Aman

■ membenarkan adanya penemuan tersebut.

■ Namun, dia melimpahkannya ke Polresta

Namun, dia menghimpunkannya ke Polresta Sidoarjo. Mengenai besaran kaliber atau apakah peluru itu merupakan baru, Aman enggan berkomentar lebih lanjut. Begitu juga Kasihumas Polresta Sidoarjo Iptu Tri Novi Handono. "Masih dalam pendalaman dan penyelidikan," katanya.

Sementara itu, dari informasi yang dihimpun di lapangan, diketahui peluru tersebut ditemukan warga dan dilaporkan ke Polsek Krian pada Minggu (18/6) sore. Polisi kemudian mengamankan setidaknya 16 butir peluru yang masih utuh. Diduga, peluru tersebut diperuntukkan senjata laras panjang. "Sempat meledak, tapi tidak sampai seperti bom. Cuma terdengar meledak," ujar MN, warga sekitar yang enggan disebutkan namanya.

Menurut pria 45 tahun itu, ada sekitar empat peluru yang meledak di tanah kavling dekat Perumahan Pesona Permata Ungu, Tempel, Krian, tersebut. Suara ledakan terdengar salah seorang warga yang sedang berada di teras sekitar pukul 16.30. Mengenai apakah peluru itu meledak karena ditembakkan atau tidak, dia tidak tahu. Warga berasumsi bahwa peluru tersebut meledak karena terkena panas matahari.

"Katanya begitu, cuma saya belum tahu juga, entah karena ada yang sengaja atau bagaimana, karena *nggak* mungkin kalau kena panas siang hari," ungkapnya.

MN dan beberapa warga sekitar tidak tahu pasti kapan peluru tersebut dibuang ke tanah kavling itu.

MN mengatakan, lokasi tersebut memang terkadang dibuat orang membuang sampah

terkadang membuat orang membuang sampah.
Kamera CCTV yang menyorot lokasi juga
diketahui tidak aktif. Tapi, menurut MN,
beberapa CCTV lain di sekitar lokasi telah
diminta oleh pihak berwajib untuk
penyelidikan. (eza/c7/any)



ISTIMEWA

TAK DIKETAHUI ASALNYA: Belasan butir peluru yang ditemukan warga di tanah kosong di Desa Tempel, Krian, Minggu (18/6) sore.

Warga Krian Temukan 16 Peluru yang Masih Aktif

SIDOARJO – Belasan butir peluru tajam aktif ditemukan warga Desa Tempel, Krian, di sebuah tanah kavling dekat permukiman. Warga mengetahui adanya peluru tersebut setelah mendengar suara ledakan. Saat didatangi, di sekitar sumber suara itu terdapat 16 butir peluru yang tersebar di berbagai titik.

Jawa Pos

Ketika dikonfirmasi kemarin (20/6), Kanitreskrim Polsek Krian AKP Aman membenarkan adanya penemuan tersebut. Namun, dia melimpahkannya ke Polresta Sidoarjo. Mengenai besaran kaliber atau apakah peluru itu merupakan baru, Aman enggan berkomentar lebih lanjut. Begitu juga Kasihumas Polresta Sidoarjo Iptu Tri Novi Handono. "Masih dalam pendalaman dan penyelidikan," katanya.

Sementara itu, dari informasi yang dihimpun di lapangan, diketahui peluru tersebut ditemukan warga dan dilaporkan ke Polsek Krian pada Minggu (18/6) sore. Polisi kemudian mengamankan setidaknya 16 butir peluru yang masih utuh. Diduga, peluru tersebut diperuntukkan senjata laras panjang. "Sempat meledak, tapi tidak sampai seperti bom. Cuma terdengar meledak," ujar MN, warga sekitar yang enggan disebutkan namanya.

Menurut pria 45 tahun itu, ada sekitar empat peluru yang meledak di tanah kavling dekat Perumahan Pesona Permata Ungu, Tempel, Krian, tersebut. Suara ledakan terdengar salah seorang warga yang sedang berada di teras sekitar pukul 16.30. Mengenai apakah peluru itu meledak karena ditembakkan atau tidak, dia tidak tahu. Warga berasumsi bahwa peluru tersebut meledak karena terkena panas matahari.

"Katanya begitu, cuma saya belum tahu juga, entah karena ada yang sengaja atau bagaimana, karena *nggak* mungkin kalau kena panas siang hari," ungkapnya.

MN dan beberapa warga sekitar tidak tahu pasti kapan peluru tersebut dibuang ke tanah kavling itu.

MN mengatakan, lokasi tersebut memang terkadang dibuat orang membuang sampah. Kamera CCTV yang menyorot lokasi juga diketahui tidak aktif. Tapi, menurut MN, beberapa CCTV lain di sekitar lokasi telah diminta oleh pihak berwajib untuk penyelidikan. (eza/c7/any)

Tuntut Kenaikan Siltap, Perangkat Desa Se Sidoarjo Geruduk Pendopo Delta Wibawa

REDAKSI 20 JUNI 2023 14:58:14

18
Shares



DEMO - Ratusan perangkat desa se Kabupaten Sidoarjo menggeruduk Pendopo Delta Wibawa menuntut kenaikan penghasilan tetap (Siltap), Selasa (20/06/2023).

Sidoarjo (republikjatim.com) - Ratusan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menggelar aksi demonstrasi dengan menggeruduk Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo, Selasa (20/06/2023). Para perangkat desa ini menuntut kenaikan penghasilan tetap (Siltap) dan tunjangan purna tugas untuk perangkat dan kepala desa di Sidoarjo.

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Sidoarjo No 77 Tahun 2018 dituangkan penghasilan tetap Kepala Desa (Kades) sebesar sebesar Rp 3.650.000, Sekretaris Desa (Sekdes) Rp 2.555.000 dan Perangkat Desa Rp 2.190.000 perbulan.

Saat unjuk rasa, para perangkat ini berbondong - bondong datang dengan mengendari mobil desa menuju Pendopo Delta Wibawa. Mereka mengenakan seragam dan menuntut kenaikan penghasilan tetap (Siltap) Rp 5 juta untuk Kades dan Rp 3,5 juta untuk Sekdes serta Perangkat Desa sebesar Rp 3 juta. Sedangkan tunjangan purna tugas perangkat desa mencapai sebesar Rp 50 juta.

Ketua PPDl Kabupaten Sidoarjo, Dian Sudariyanto menyebutkan para perangkat desa ini datang ke pendopo untuk menagih janji Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali yang disampaikan dua tahun lalu.

"Dua tahun lalu kami diundang Bupati ke sini (Pendopo Delta Wibawa) dan dijanjikan peningkatan kesejahteraan. Tetapi sampai sekarang belum ada realisasinya," ujar Ketua PPDl Sidoarjo, Dian Sudariyanto di depan Pendopo Delta Wibawa usai aksi demo.



Lebih jauh, Sudariyanto menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo selama ini terus meningkat. Karena itu, tidak ada alasan untuk tidak menaikkan Siltap perangkat desa di Kota Delta itu.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

"Kenyataannya sampai sekarang tuntutan kami soal kenaikan Siltap tak kunjung direalisasikan," tegasnya.

Dalam aksi demonstrasi ratusan perangkat desa ini tidak ditemui Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali maupun Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi. Para perangkat desa ini, hanya ditemui Pj Sekda Andjar Surjadianto dan Asisten 1 Setda Pemkab Sidoarjo Ainur Rahman serta anggota dan pimpinan Komisi A DPRD Sidoarjo.

Asisten 1 Setda Pemkab Sidoarjo, Ainur Rahman dihadapan para perangkat desa menyebutkan aspirasi dari PPDJ akan ditampung dan akan dilakukan pembahasan kembali dengan Bupati Sidoarjo.

"Aspirasi penjenangan untuk kenaikan Siltap akan diakomodir. Besarannya nanti akan kami tentukan dengan beliau (Bupati Sidoarjo)," papar mantan Camat Sukodono ini.

Ainur menyebutkan saat ini Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali tidak dapat menemui para perangkat desa karena sedang ada tugas di Jakarta.

"Nanti kalau beliau (Bupati) sudah di Sidoarjo akan dibahas kembali soal tuntutan ini," urainya.



Sementara Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo M Dhamroni Chudlori menyatakan akan mengawal aspirasi dan tuntutan PPDJ Sidoarjo itu.

"Kami berkomitmen akan mengawal aspirasi ini untuk kesejahteraan bersama. Soal nilai nominal besaran kenaikannya menyesuaikan kekuatan APBD Pemkab Sidoarjo," tandasnya.

Usai mendapat penjelasan dari DPRD dan Pemkab Sidoarjo massa dari PPDJ membubarkan diri dengan tertib. Massa kemudian memberikan waktu satu minggu untuk kepastian persetujuan tuntutan kenaikan Siltap itu. Hel/Waw





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Peringati Hari HWDI Dan Peresmian Sekretariat, DPC HWDI Sidoarjo Berharap Bisa Berkembang Dan Berjaya



Redaksi Majalah Global
18 Juni 2023 - 17:06



Peringati Hari HWDI Dan Peresmian Sekretariat, DPC HWDI Sidoarjo Berharap Bisa Berkembang Dan Berjaya

Sidoarjo, majalah global.com – Keterbatasan bukanlah suatu hambatan untuk tetap bisa berkarya, HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia), DPC Sidoarjo memperingati Hari HWDI dan Peresmian Sekretariat, Minggu (18/06/2023).



Kedatangan Dinas Kesehatan dan Dinas Koperasi sangat bermanfaat sekali bagi HWDI DPC Sidoarjo, karena ini juga menjadi bekal bagi mereka untuk bisa meningkatkan produk- produk UMKM yang dimiliki, dan terlihat antusias sekali para anggota HWDI, mendengarkan penjelasan dari beberapa nara sumber.

“Kita akan selalu mendukung dan saya sangat apresiasi sekali pada kegiatan HWDI, kita bisa berkolaborasi dan bisa memberdayakan HWDI yang ada, karena dengan data di lapangan, itu sangat membantu kita untuk bisa mendukung program mereka, berharap nantinya masyarakat yang mengalami disabilitas juga mendapatkan dukungan secara nasional,” harap Kepala Bidang Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Sidoarjo, Sri Andari E, SKM., MM.

Kabid. Pemberdayaan Usaha Mikro Kab. Sidoarjo, Rizkia Ananda, SE., MM., juga menambahkan, dalam pertemuan ini kita memberikan wawasan kepada HWDI terkait apa yang difasilitasi Dinas Koperasi, Dinas Koperasi akan memberikan fasilitas dalam hal legalitas usaha, kemudian meningkatkan usaha atau para pelaku usaha disabilitas supaya bisa naik kelas, dan dalam pengurusan NIB (No Induk Berusaha), bersertifikat halal tidak dikenakan biaya (gratis),” terangnya.

“Untuk persyaratan NIB hanya dibutuhkan KTP saja, dan untuk yang bersertifikat halal persyaratan adalah KTP, KK, NIB, kemudian foto- foto produk penyedia,” imbuhnya.

Ketua DPC HWDI Sidoarjo, Siti Aisyah, mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya atas kedatangan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Koperasi, atas ilmu yang diberikan, ini sangat bermanfaat bagi kita semua,” ungkapnya.

“Saya berharap dengan adanya pelatihan yang diberikan kepada kami (disabilitas), pemerintah juga memberikan dana pengembangan untuk latihan itu, supaya pelatihan- pelatihan yang kita dapatkan tidak terkesan mubazir, dan memang kendala satu- satunya di UMKM adalah pada permodalan,” tutup Ketua DPC HWDI Sidoarjo Siti Aisyah. (Lidya)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPRD: Naikkan Siltap Perangkat Desa Butuh Rp 55 M

Daerah



Jurnalis: Fathur Roziq | Editor: Mamo

Selasa, 20 Juni 2023 22:21

KETIK, SIDOARJO – Pertemuan perangkat desa dengan pejabat Pemkab Sidoarjo dihadiri juga oleh anggota DPRD Sidoarjo. Namun, mereka datang kemudian ke Pendapa Delta Wibawa Selasa (20/6/2023). Dua orang dewan itu menyusul bergabung. Masing-masing H Haris dan A. Dhamroni Chudlori. Keduanya anggota badan anggaran (banggar) sekaligus komisi A (pemerintahan).

Haris diberi kesempatan lebih dulu. Legislator PAN itu menyatakan siap mengawal tuntutan peningkatan siltap oleh perangkat desa. Tuntutan mereka perlu diakomodasi. Masih ada ruang. Yaitu, pembahasan APBD 2024. Bupati Gus Muhdlor Ali juga harus memberikan ruang.

"Aspirasi *Njenengan* pasti kami dengar. Insya Allah DPRD tidak tuli," ungkap Haris.

Dia menjawab pernyataan salah seorang perangkat bahwa APBD Sidoarjo besar. Mengapa siltap perangkat tidak juga dinaikkan. Sejak 2022 tidak juga ada perbup yang mengaturnya. Dijelaskan oleh Haris, memang APBD besar. Sekitar Rp 5 triliun. Namun, kemampuan fiskal sebenarnya kecil. Sebab, banyak program lain yang perlu dijalankan untuk masyarakat.

"Tujuh belas program bupati juga belum tercapai," ungkapnya.

Namun, tegas Haris, badan anggaran memastikan akan selalu mengikuti pembahasan APBD. Termasuk tuntutan kenaikan siltap perangkat desa. Untuk ini, posisi anggota dewan tidak akan mewakili daerah pemilihan, tetapi mewakili seluruh masyarakat Sidoarjo.





Anggota Banggar dan anggota Komisi A DPRD Sidoarjo H Haris menyatakan siap mengawal pembahasan kenaikan siltap perangkat desa. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

"Tapi, kalau *Sampeyan* sudah tercukupi, kami harap pelayanan ditingkatkan," ujarnya. Para perangkat pun menjawab bersemangat. "Siaaaaap."

Dhamroni Chudori yang datang terakhir duduk di samping Pj Sekda Andjar Supardijanto. Diberikan giliran bicara. Saat itulah, beberapa orang di dalam ruang tamu pendapa segera mendekat. Bersiap dengan ponsel masing-masing. Moda video dinyalakan. Aksi Dhamroni pun diabadikan.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Wakil rakyat asal Tulangan itu mengaku sudah mengikuti pembahasan sebelumnya. Saat ini, yang terpenting ialah segera sampaikan konsep PPDI. Berapa kenaikan siltap yang diinginkan. Tentu, asisten bupati dan Pemkab Sidoarjo juga punya konsep.

Banggar tidak bisa memutuskan dengan asumsi. Lebih-lebih asumsi yang belum diketahui risikonya. Jadi, konsepnya, tuntutan dalam konsep PPDI dan Pemkab akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Banggar siap menyetujui karena kenaikan siltap sudah menjadi janji bupati. Akan dikabulkan.

"Keputusan akhir ada di Pak Bupati," tegasnya.

Menurut legislator asal PKB itu, asumsi kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp 55 miliar. Angka itu mengacu pada konsep kenaikan siltap dari PPDI. Jumlah seluruh perangkat desa di Sidoarjo diperkirakan sekitar 3.500 orang. Dia belum tahu bagaimana konsep Pemkab. Yang pasti, konsep PPDI dipadukan dengan konsep pemda. Angka kenaikan bervariasi. Sesuai jabatan masing-masing.

"Kita komit peningkatan (siltap) selalu kita kawal," tandas Dhamroni. Hasil pertemuan di dalam pendapa kemudian disampaikan ke massa pengunjuk rasa di depan pagar pendapa. Sekda Andjar tampak berhati-hati naik ke atas mobil. Tangannya memegang tiang bendera. Duduk, lalu berdiri lagi, sambil kembali memegang tiang bendera. Lalu, tersenyum.

Menyusul kemudian Asisten 1 Ainur Rahman, H Haris, Dhamroni, serta perwakilan perangkat desa, Kusnadi dan Dian Sudariyanto, serta beberapa orang lain. Belum lagi kesempatan bicara mulai. Adzan Duhur terdengar. Massa dan para pejabat pun menunggu adzan Masjid Jamik Sidoarjo selesai. (*)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Blangko e-KTP Kosong, Komisi A Minta Dispendukcapil Sidoarjo Gunakan Dana Hibah

by Radar Jatim — 21 Juni 2023 in Politik

0



H. Damroni Chudlari, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo.

27
VIEWS



SIDOARJO (RadarJatim.id) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo menunjukkan keseriusannya untuk menyelesaikan kekosongan blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP yang terjadi beberapa bulan ini.

H. Damroni Chudlari, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sidoarjo agar permasalahan ini segera terselesaikan.

“Hari ini kami sudah melakukan koordinasi dengan Dispendukcapil (Kabupaten Sidoarjo, red) untuk mencari solusi terbaik terkait kelangkaan blangko e-KTP,” kata Damroni saat ditemui RadarJatim.id di ruang kerjanya, Selasa (20/06/2023).



Ada dua skema yang akan dilakukan Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi kosongnya blangko e-KTP, yaitu mengajukan permohonan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan melalui dana hibah.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Kecamatan Tulangan itu bahwa pemberian hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo kepada Kemendagri diperbolehkan dan tidak melanggar undang-undang.

“Insya’ Allah bulan depan, Komisi A dan Dispendukcapil ke Kemendagri untuk mengajukan permohonan terkait kelangkaan blanko e-KTP di Kabupaten Sidoarjo,” katanya.

Jika pengajuan permohonan blanko e-KTP tidak disetujui, maka Pemkab Sidoarjo harus mempersiapkan dana hibah ke Kemendagri sebesar Rp 712.740.000 untuk 70.000 keping e-KTP, dimana setiap keping e-KTP membutuhkan anggaran sebesar Rp 10.182.

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ini, kosongnya blanko e-KTP di Kabupaten Sidoarjo harus segera teratasi, karena menjadi salah satu persyaratan bagi warga saat akan menggunakan hak pilihnya nanti.

“Permasalahan ini harus segera teratasi, agar pemilih pemula ataupun mereka yang mengganti e-KTPnya karena rusak. Dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu (2024, red) nanti,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa hingga bulan Juni 2023 ini, ada sekitar 13 ribu warga yang terpaksa masuk daftar tunggu akibat kosongnya blanko e-KTP di Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo.

Sedangkan Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo hanya mendapatkan jatah sekitar 2 ribu blanko dari Kemendagri, dimana jumlah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan harian pencetakan e-KTP yang jumlahnya mencapai ribuan. (mams)

